

Silang-sengkarut Ibukota Budaya dan Otoritas FKY

Oleh Lephén Purwaraharja

SETIAP menjelang Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) berhamburan tanya. Siapa pengurusnya? Dengan siapa dan berapa personil yang dilibatkan dalam kegiatan itu? Bagaimana persiapannya? Apa saja yang disajikan? Berapa dana yang dikucurkan Pemda Propinsi DIY? Berapa besar usaha dana yang digalang oleh Panitia Pelaksana? Bagaimana relevansi kegiatan ini bagi kesejahteraan dan kebebasan berekspresi seniman? Apakah soal pajak tontonan sudah dituntaskan untuk kegiatan ini?

Banyak pekerjaan yang sejak FKY I (1989) hingga kini belum tuntas benar atau jarang benar-benar tuntas mengantisipasi persoalan klasik itu. Selama ini, FKY masih sekadar ada, belum ada upaya pemberdayaan baik kuantitas maupun kualitas karya seni yang layak disajikan. Sementara visi dan misi FKY pun remang-remang, dan setiap ganti panitia maka kebijakannya pun menurut kata hari dan wacana pengelola. Apakah FKY untuk menyajikan karya unggulan seniman-seniwati, ajang kompetisi (lomba) atau penjiwaan karya tradisi yang ada? Apa tolak ukurnya guna menetapkan materi, grup, dan kelompok di pentas FKY Propinsi DIY? Dari pertanyaan ini saja tidak mudah untuk menjawabnya. Bahkan, Panitia Pelaksana pun belum tentu punya barometer yang transparan untuk menjelaskan dan menentukan semua kebijakannya.

Indikasinya yang berulang-ulang terjadi selama ini FKY dipersiapkan secara 'mendadak'. Tiba-tiba bulan April atau Mei harus persiapan FKY! Apa yang bisa dikerjakan dengan dua bulan untuk mengelola FKY secara profesional dan memadai. Kalau asal ada dan terselenggara memang bisa saja terlaksana, tetapi FKY akan jalan di tempat dan mengalami kemunduran, kemerosotan kualitas, serta kuantitas karya seni. Di sisi lain FKY hanya akan menjadi "pelaksana anggaran" dari Pemda DIY, bukan media ikhtiar pada kesejahteraan seniman serta penghargaan karya seni, karena potensi bisnis, khususnya komersialisasi pro-

mosi dan aneka kegiatan seni di even FKY sangat besar. Mengapa belum tergalgi? Jawabnya, apakah disebabkan lantaran FKY masih 'tersanjung' sebagai kegiatan Pemda Propinsi DIY c/q Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga alokasi dana tetap, khususnya, menjadi kendala yang menjerat langkah untuk profesional, transparan, dan menjaga kualitas karya seni serta berdampak bagi kesejahteraan seniman, pekerja seni, dan masyarakat luas?

Kemunduran FKY selama ini, karena tidak ada kesepadan dan kedinamisan dalam mensikapi even FKY. Asal jalan dan asal ada berkesan dalam setiap penyelenggaraan. Jargon pemerataan sering tidak berlaku. Jargon mutu seni juga tak terujikan. Jargon komersialisasi seni dalam FKY pun juga tidak jelas aplikasinya. Maka, silang sengkarut pengelolaan FKY memungkinkan penyelenggaraan kegiatan yang semestinya merupakan sinergi antara seni - komersial - pariwisata dan kesejahteraan rakyat belum dapat terealisasikan.

Dewan Kesenian (DK) DIY konon tengah lesu saat ini mungkin juga bukan penyebab letihnya FKY, sebab semua tergantung kinerja dan profesionalisme semua pihak yang ada di dalamnya. Seharusnya FKY dapat dikelola secara baik, dan DK-DIY berperan aktif mengawasi dan membantu optimalisasi yang harus dijalankan Panitia Pelaksana FKY. Tidak perlu menunggu mengganti DK-DIY menjadi Dewan Kebudayaan DIY, tetapi membentuk Pokja Kajian dan Evaluasi FKY XIV perlu dilakukan dengan menunjuk lembaga independen yang akan dilaporkan ke Dewan Kebudayaan DIY (bila terbentuk nanti).

Badan Otoritas

SELAMA ini FKY masih bergantung pada SK Gubernur perihal penunjukan Pembentukan Panitia Pelaksana FKY Propinsi DIY dan dilanjutkan penunjukan Ketua Umum FKY oleh Dewan Kesenian DIY selama dua tahun. Keberadaan Panitia Pelaksana FKY DIY pun mengalami kendala klasik yaitu persiapan, khususnya perancangan program yang seharusnya sudah diputuskan bulan November tahun sebelumnya atau 8 bulan sebelum kegiatan berlangsung.

Tampaknya kelemahan menjalar dari pendanaan yang selalu terlambat datang, lalu ke Sekretariat dan ditambah tidak ada Litbang FKY. Kontinuitas kegiatan FKY Propinsi DIY pun berjalan episodial dan sering tidak berkorelasi dengan kegiatan sebelumnya. Ujung tombak Pelaksana FKY Propinsi DIY yaitu seksi-seksi berbagai cabang seni tidak dapat bertindak profesional dan proporsional. Kerangka acuannya prestasi, pemberdayaan, atau pelestarian? Skupnya lokal, nasional, atau internasional? Porsinya untuk grup penyaji yang dipilih Seksi (FKY) mendapatkan sekian prosen, dan penyaji partisipan sekian prosen atau Seksi (Bursa Seni, Pameran Lukisan, Pasar Seni FKY) atau bidang lain yang profit besar wajib setor sekian prosen atau mendanai sajian seni pertunjukan rakyat pun hingga kini masih menjadi ajang kecemburuan seniman, pekerja seni, dan birokrat seni.

Solusinya, mulai tahun depan FKY XV, perlu ditata dan dipersiapkan dengan membentuk Badan Otoritas FKY atau apa pun namanya yang penting berfungsi: (1) Mengevaluasi secara komprehensif terbuka, dan transparan segala kegiatan FKY XIV. (2) Mempersiapkan secara matang terencana, subsidi pemerintah, aspek bisnis, pariwisata, dan keunggulan karya seni serta pelestarian seni tradisi pada kegiatan FKY V sejak Agustus hingga Nopember 2002. Tanggal 2 Januari 2003 diharapkan persiapan selesai dan pada bulan Maret 2003 lembaga swasta, asing, dan lain-lain serta seniman yang terlibat sudah jelas sehingga sebulan sebelum hari H sudah mencapai persiapan yang vit. Semua berlangsung secara fair. (3) Laporan diberikan kepada pemberi mandat dan pengawasan pun dilakukan oleh DK sehingga setelah pelaksanaan dapat melakukan evaluasi kembali dan tindak lanjut lainnya sesuai skedul tetap tersebut. (4) Pembatasan, pengetatan dan pembinaan Ketua Bidang atau Seksi yang terlalu lama - lebih dari dua periode bahkan ada yang 14 tahun di bidang yang sama perlu dicegah sebab akan menimbulkan kecemburuan, kolusi, dan tidak memberi sumbangan bagi generasi muda pengelola seni untuk belajar, dan maju dalam mengelola kegiatan pemasaran

atau komersialisasi karya seni.

Hanya dengan memberi otoritas atau otonomi maka suatu saat segera FKY bukan hanya "meminta terus" anggaran Pemda DIY untuk kegiatannya, tetapi bahkan akan menjadi ajang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana yang ada rutin FKY untuk Festival Sendratari, Festival Teater Modern, Festival Musik, Festival Wayang, Festival Kethoprak, Pameran Seni Rupa, Festival Film, dan sayembara kegiatan lain yang perlu untuk menopang kegiatan FKY sebagai "presentasi puncak karya seni."

FKY ke depan, tidak lagi main tunjuk dan asal rangkul saja, atau asal jalan saja kegiatan tersebut. Selama silang sengkabut dalam penguatan Kawasan Budaya di DIY dengan FKY sebagai sarannya, dan lemahnya daya kritis serta bersatunya pekerja seni "akar rumput" mengkondisikan jagad seni di DIY menjadi tanpa arah dan progresi. Bersatunya seniman seprofesi untuk mendesak DPRD DIY dan Pemda DIY melakukan kebijakan yang menjaga integritas dan jati diri seni budaya sebagai wahana kesejahteraan rakyat, khususnya seniman dan generasi muda berpotensi untuk menguatkan posisi Yogya sebagai Ibukota Budaya dari kesan warga Yogya, Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman serta daerah di Nusantara ini, juga dunia internasional.

Tanpa peran semua masyarakat, akademisi, LSM Seni-Budaya, tokoh pamong budaya, Ibukota Budaya. Yogya tinggal nama yang ada dalam prasasti batu nisan ingatan.



KR-JAY

Visi dan misi FKY masih remang-remang. Ganti panitia ganti kebijakan, menurut kata hati dan wacana pengelola. Salah satu kegiatan FKY yang masih bertahan sampai sekarang Bursa Seni. Tampak suasana Bursa Seni FKY VII tahun 1995.

Ita tidak pernah hidup sebagai kota dengan kehidupan berhati nurani, cendekia, kreatif dan penuh aktivitas seni-budaya yang beragam. Otonomi Daerah bila kita tidak turunkan tangan dan berjalan sendiri-sendiri maka akhir kisah Ibukota Budaya Yogya dengan sedikit demi sedikit upaya menumpaskan agenda seni-budaya yang ada oleh eksekutif dan legislatif. Saat ini jelas akan sampai pada 1000 harinya Ibukota Budaya Yogya. □○

***) Lephén Purwaraharja, alumni ISI Yogya.**